



PEMIMPIN VISIONER DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI
PENURUNAN STUNTING KABUPATEN TRENGGALEK DI MASA PANDEMI
COVID-19

Oleh

Mochammad Nur Arifin¹, Nuri Herachwati², Andriyanto³

^{1,2,3}Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: ¹mochammad.nur.arifin-2021@pasca.unair.ac.id,

²nuri-h@feb.unair.ac.id, ³andry_anto2005@yahoo.com

Abstrak

Stunting merupakan kegagalan tumbuh kembang anak pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Pada dasarnya anak yang mengalami kegagalan tumbuh kembang atau dalam konsisi Stunting akan sangat rentan terhadap penyakit, kecerdasan kurang normal, dan pada akhirnya akan menyebabkan daya produktivitas rendah sehingga efek jangka panjangnya Angka Kemiskinan akan tinggi. Oleh karena itu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek periode 2016-2021 telah melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 dengan memasukan Indikator Persentase Balita *Stunting* menjadi Indikator sasaran yang secara otomatis menjadi tanggungjawab semua OPD terkait tidak hanya Dinas Kesehatan PPKB saja. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemimpin visioner dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting. Jenis penelitian yang digunakan dalam ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan stranas 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting dari Bappenas yang meliputi Aksi ke 1: Analisis Situasi, 2: Penyusunan Rencana Kegiatan, 3: Rembuk Stunting, 4: Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa, 5: Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, 6: Sistem Manajemen Data, 7: Pengukuran dan Publikasi Data Stunting, 8: Review Kinerja Tahunan dengan teknik Purposive Sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Pencegahan stunting dilakukan melalui 8 aksi integrasi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan sensitif. Melalui kegiatan ini maka pemerintah Kabupaten Trenggalek mampu untuk menyasar kelompok prioritas yang selanjutnya digunakan sebagai kunci pemberian intervensi dan perbaikan tumbuh kembang sehingga keberhasilan dalam rangka menekan angka *stunting* akan tercapai. Sehingga peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam setiap langkah aksi integrasi adanya komitmen pimpinan tertinggi di setiap level sehingga diharapkan program pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan maksimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: 8 Aksi Konvergensi, Stunting

PENDAHULUAN

Stunting merupakan kegagalan tumbuh kembang anak pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Pada dasarnya anak yang mengalami kegagalan tumbuh kembang atau dalam konsisi Stunting akan sangat rentan

terhadap penyakit, kecerdasan kurang normal, dan pada akhirnya akan menyebabkan daya produktivitas rendah sehingga efek jangka panjangnya Angka Kemiskinan akan tinggi. Apabila hal ini terjadi maka beban Negara juga akan meningkat karena biaya pengobatan akan semakin tinggi sedangkan pendapatan negara



tidak bertambah atau bahkan mengalami penurunan karena sumber daya manusia yang dimiliki tidak produktif. Menurut standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), suatu wilayah atau negara dianggap kronis jika prevalensinya di atas 20 persen. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 Kabupaten Trenggalek menunjukkan, 14,9 persen balita mengalami stunting.

Prevalensi kejadian *stunting* di Indonesia menduduki posisi terbesar ke dua di kawasan Asia Tenggara di bawah Laos yang mencapai 43.8%. Riset kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada 2013 menunjukkan 37.2% atau sekitar 9 juta anak balita mengalami *stunting*. Pada tahun 2016, data Sirkesnas menunjukkan kejadian *stunting* mengalami penurunan yaitu sekitar 33.6% namun dengan demikian, angka ini masih dikategorikan tinggi. Berdasarkan data Bulan Penimbangan Balita Kabupaten Trenggalek, persentase balita *stunting* pada kurun waktu tahun 2018 sebesar 14,9% sedangkan pada tahun 2021 sebesar 9,73%.

LANDASAN TEORI

Balita pendek (*Stunting*) adalah kondisi status gizi yang didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U berdasarkan perhitungan antropometri yang digunakan untuk melihat status gizi. Ambang batas yang digunakan dalam pengukuran tersebut yaitu (*Z-Score*) < -2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/*stunted*) dan < -3 SD (sangat pendek/*severely stunted*).

Kepemimpinan visioner, adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas [1].

Berdasarkan [2] menyatakan bahwa kepemimpinan menghadapi suatu era perubahan pesat atau "*accelerating*" perubahan. Karenanya, waktu merupakan faktor penting untuk menjadikan seorang pemimpin visioner.

Guna menghadapi perubahan pesat ini dengan baik, pemimpin harus memiliki serangkaian kompetensi yang pokok seperti kemampuan: antisipasi, kecepatan, *agility* dan persepsi.

Antisipasi berarti bahwa kepemimpinan visioner harus secara proaktif mengamati lingkungan guna menemukan perubahan yang secara negatif maupun positif mempengaruhi organisasi. Menjadi "*perceptive, nimble* dan *innovative*" dalam lingkungan yang berubah pesat akan memberikan manfaat bagi organisasi.

Kecepatan (*speed*) merupakan faktor penting untuk mempertahankan posisi kompetitif, merespon secara kompetitif terhadap kebutuhan pelanggan dan menghemat uang. Pemimpin visioner melihat kecepatan sebagai sebuah kemampuan yang harus dikuasai guna memuaskan konsumen yang menginginkan pelayanan atau pemenuhan kebutuhan seketika. Teknologi informasi, pelayanan *on-line* melalui internet merupakan prasyarat bagi pemerintah dalam membentuk *highest quality service*.

Kecerdikan (*agility*) merupakan istilah lain yang secara perlahan berhubungan dengan kepemimpinan visioner. [2] mengatakan bahwa "*agility is the ability to turn on a dime.*" Kecerdikan merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk melihat ke depan dalam kaitan dengan faktor apa yang terletak di depan bagi sebuah organisasi (*perceptiveness*).

Perceptiveness merupakan kapasitas penting lain dari kepemimpinan visioner. Pemimpin harus waspada terhadap segala bentuk intrik dan perubahan di lingkungan eksternal. Kewaspadaan ini harus segera ditindaklanjuti guna merespon secara cepat dan tepat, dan mengambil langkah-langkah yang tepat.

[3] mengungkapkan ada empat peran yang harus dimainkan oleh pemimpin visioner dalam melaksanakan kepemimpinannya, yaitu:

Peran penentu arah (*direction setter*). Peran ini merupakan peran di mana seorang



.....S
pemimpin menyajikan suatu visi, meyakinkan gambaran atau target untuk suatu organisasi, guna diraih pada masa depan, dan melibatkan orang-orang dari "get-go."

Agen perubahan (*agent of change*). Agen perubahan merupakan peran penting kedua dari seorang pemimpin visioner.

Juru bicara (*spokesperson*). Pemimpin, sebagai juru bicara untuk visi, harus mengkomunikasikan suatu pesan yang mengikat semua orang agar melibatkan diri dan menyentuh visi organisasi secara internal dan secara eksternal.

Pelatih (*coach*). Pemimpin visioner yang efektif harus menjadi pelatih yang baik, dengan ini berarti bahwa seorang pemimpin harus menggunakan kerjasama kelompok untuk mencapai visi yang dinyatakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Trenggalek dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono, 201 yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemimpin Visioner

Sebelum *stunting* menjadi isu Nasional Bupati Trenggalek sebagai Kepala Daerah yang visioner pada tahun 2017 telah merancang pelaksanaan konvergensi program/kegiatan untuk intervensi penanganan *stunting* dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dengan memasukkan indikator persentase balita *stunting* menjadi indikator sasaran yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek

Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.



Sumber: BAPPEDALITBANG Kabupaten Trenggalek 2020

Dengan dimasukkannya Indikator *Persentase Balita Stunting* ke dalam Indikator Sasaran maka secara otomatis masalah *stunting* tidak saja menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan PPKB saja, akan tetapi juga akan menjadi tanggungjawab seluruh OPD yang terkait bahkan masyarakat dan seluruh stakeholder terkait.

Selanjutnya pemerintah Kabupaten Trenggalek menjabarkan RPJMD 5 tahun berikutnya dalam RPJMD Tahun 2021-2026. RPJMD sebagai Penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah merupakan Rencana Pembangunan Dengan masa 5 tahun. Visi RPJMD 2021-2026 “Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumberdaya Manusia Kreatif, dan Pembangunan Berkelanjutan”. Misi RPJMD 2021-2026 antara Lain :

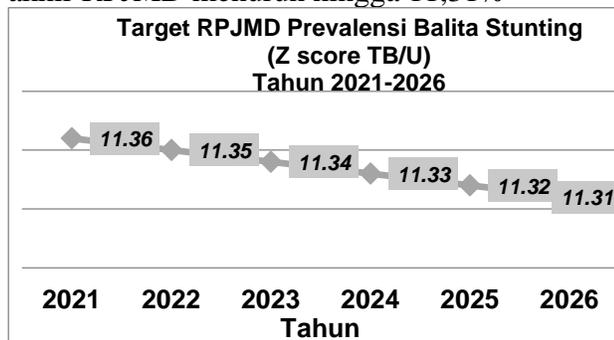
- a. Memastikan UMKM naik kelas serta membangun tata niaga sektor Pertanian dan Perikanan yang inklusif, mendorong investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan wirausahawan baru yang berorientasi pada langkah pengentasan kemiskinan dan ekonomi pesantren,
- b. Mewujudkan Trenggalek sebagai kota Pariwisata berbasis kolaborasi dan



- berkelanjutan di mulai dari pemberdayaan masyarakat desa,
- Mewujudkan pemerintahan kolaboratif dan mengarusutamakan gender dalam rangka memastikan pelayanan yang prima, khususnya pelayanan adminduk, pendidikan dan kesehatan berbasis big data (satu data besar),
 - Mewujudkan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan.

Strategi pemerintah daerah untuk mencapai visi misi tersebut yaitu dengan mengangkat program prioritas tahun 2021-2026 antara lain: Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia (SDM) Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan

Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kreatif, dan sesuai penjabaran Misi ke-3, Bupati Trenggalek menjadikan indikator *Prevalensi Balita Stunting* sebagai Indikator Sasaran dengan Indikator Tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target di akhir RPJMD menurun hingga 11,31%



Sumber: BAPPEDALITBANG Kabupaten Trenggalek

Untuk meningkatkan efektifitas pendanaan prioritas pencegahan dan penanganan *Stunting*, Kabupaten Trenggalek memiliki Strategi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Trenggalek meliputi :

Penguatan Komitmen Daerah

- Memasukkan Indikator % Balita *Stunting* dalam Indikator Sasaran RPJMD
- Penyusunan Regulasi Daerah Strategi Pencegahan dan Penanganan *Stunting*

- Penyusunan Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan *Stunting*
- Permasalahan *Stunting* menjadi isu strategis pembangunan daerah

Penguatan data dan Informasi

- Penyusunan data base *Stunting*
- Input Data Pelaksanaan 8 Rencana Aksi tepat waktu
- Penyusunan Jurnal dan Profil *Stunting* Kabupaten
- Pemanfaatan data dalam penyusunan inovasi daerah

Sinkronisasi Perencanaan dan Monev Program

- Sinkronisasi dengan tahapan perencanaan pembangunan daerah
- Alokasi Dana Desa untuk pencegahan dan penanganan *Stunting*
- Alokasi BKK Desa untuk Desa Lokus Prioritas

Koordinasi antar Stakeholder

Memperkuat koordinasi antar *Stakeholder* ABCGM (*Akademisi, Business, Community, Government, dan Media*) melalui pembahasan strategi program secara bersama sejak dini dan penyusunan program antar instansi/pelaku secara terpadu dan tepat sasaran.

Pelaksanaan Aksi Kovergensi

Aksi ke 1 : Analisis Situasi

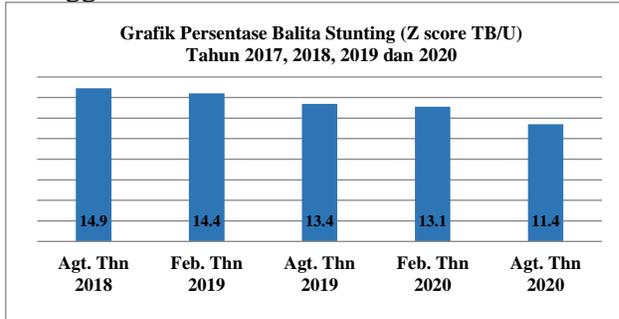
Aksi ini dilakukan bertahap mulai dari Pengisian data bersama indikator layanan Spesifik pada awal Bulan Maret 2020 secara serentak melalui link spreadsheet Aksi Konvergensi *Stunting* Kabupaten Trenggalek Tahun 2020. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian indikator layanan Sensitif pada tanggal 13 Maret 2020. Pada tanggal tersebut 20 indikator layanan spesifik dan sensitif diisi secara serentak dan langsung dilakukan analisa bersama, sehingga pada hari yang sama, perencanaan kegiatan tahun berikutnya (2021) dapat dilakukan dan diramu dalam sebuah dokumen yang lengkap meliputi rencana kegiatan dari berbagai *stakeholder*.



Analisa Situasi dilakukan dengan analisa persentase data *stunting* per desa dan cakupan layanan 20 indikator utama yang kemudian dikategorikan dengan pembeda berupa warna sebagaimana berikut :

	Bernilai NULL
	Bernilai antara 90-100
	Bernilai antara rerata hingga <90
	Bernilai antara batas bawah hingga rerata
	Bernilai <batas bawah

Persentase Data *Stunting* Kabupaten Trenggalek



Sumber : Bulan Penimbangan Balita, Dinas kesehatan PPKB Kabupaten Trenggalek
Berikut adalah tabel Pemenuhan Layanan pada Setiap Indikator

JUMLAH DESA / KEL	WARNA	PEMENUHAN LAYANAN PADA SETIAP INDIKATOR													
		SPESIFIK													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rata2	%
21	MERAH	6	22	15	30	32	10	8	33	11	24	24	51	22,17	14,1
	JINGGA	3	47	18	44	40	24	33	9	4	38	73	40	31,08	19,8
	KUNING	0	0	0	33	35	0	0	6	0	0	7	49	10,83	6,9
	HIAU	148	88	124	50	50	123	116	109	142	95	53	17	92,52	59,2

JUMLAH DESA / KEL	WARNA	PEMENUHAN LAYANAN PADA SETIAP INDIKATOR													
		SENSITIF													
		13	14	15	16	17	18	19	20	Rata2	%				
21	MERAH	23	31	43	2	127	3	3	28	32,5	21%				
	JINGGA	33	32	43	69	18	9	9	0	26,6	17%				
	KUNING	25	58	55	20	11	0	0	0	21,1	13%				
	HIAU	76	36	16	66	1	145	145	129	76,8	49%				

Analisa Situasi dilakukan dengan analisa persentase data *stunting* per desa dan cakupan layanan 20 indikator utama untuk dilakukan intervensi, berikut data cakupan terendah.

2 Cakupan Layanan Spesifik Terendah:

- Cakupan keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita
- Cakupan kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan)

4 Cakupan Layanan Sensitif Terendah:

- Cakupan desa menerapkan KRPL/PPL
- Cakupan rumah tangga peserta JKN/Jamkesda
- Cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di PAUD
- Cakupan rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak

Aksi ke 2 : Penyusunan Rencana Kegiatan

Setelah mengetahui data *stunting* per desa dan cakupan layanan 20 indikator utama maka akan dibuat rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan *stunting*.

Aksi ke 3 : Rembuk *Stunting*

Pelaksanaan Rembuk *Stunting* dilaksanakan tepat pada Bulan Maret 2020 tepat sebelum berlakunya PSBB di Kabupaten Trenggalek. Dalam acara tersebut dibahas dan disepakati bersama terkait :

- Penguatan peran lintas sektor dalam konvergensi intervensi *stunting*, Penguatan pergerakan pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif
- Menyepakati sasaran dan desa prioritas, serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rencana kegiatan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di kabupaten trenggalek tahun 2020/2021.
- Menyepakati rumusan RKPDP Kabupaten Trenggalek tahun 2020/2021.
- Menyepakati bahwa pemerintah desa lokasi prioritas akan meningkatkan alokasi kebutuhan pendanaan program



dan kegiatan terkait dengan percepatan penurunan *stunting* dalam rancangan APBDES tahun 2020/2021.

Aksi ke 4 : Peraturan Bupati/ Walikota tentang Peran Desa

Selama masa pandemi COVID-19 Kabupaten Trenggalek juga melaksanakan pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada Bulan Oktober 2020 yang berupa Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Penurunan Stunting bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang di dalamnya membahas mengenai Evaluasi Pelaksanaan eHDW (Human Development Worker), Sinkronisasi Data eHDW dengan data (ePPGBM) Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Secara Elektronik, Optimalisasi eHDW dalam Advokasi Pemerintah Desa. (Bappedalitbang 2020)

Aksi ke 5 : Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

Peran kader dalam melaksanakan tugas pembangunan manusia tentu tidak lepas dari dukungan pemerintah kabupaten, hal ini bertujuan untuk memastikan kinerja kader berjalan dengan efektif sesuai dengan peran kader, kinerja kader dapat dioptimalkan dengan melakukan pembinaan, meningkatkan kapasitas kader dan pemberian insentif berbasis kinerja. Komponen terpenting yang harus diperhatikan dalam optimalisasi tugas-tugas kader ialah dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan operasional pembiayaan untuk kader. Ketersediaan dalam hal ini di perhatiakn secara kuantitas dan kualitas, kuantitas yaitu jumlahnya memenuhi sesuai dengan angka yang sudah ditetapkan sedangkan kualitas yaitu memilih kader-kader yang dirasa sanggup suka rela menjalankan kegiatan sosial dimasyarakat semisal kader posyandu, guru PAUD ataupun yang lain.

Aksi ke 6 : Sistem Manajemen Data

Sistem manajemen data *stunting* dilakukan secara online pada link spreadsheet

yang dapat diisi, diupdate dan diakses oleh stakeholder yang berkepentingan. Adapun kebutuhan data terkait pelaksanaan aksi khususnya aksi 5 juga diupdate bersama dalam link yang sama. Pengukuran status gizi baik berat badan maupun tinggi badan dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelayanan Balita di Posyandu pada Masa Pandemi Covid dan Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) yang kemudian direkap pada hasil Bulan Penimbangan Balita dan dientry pada aplikasi EPPGBM. Adapun prasarana dalam mendukung pelaksanaan Posyandu baik yang dilakukan secara buka posyandu, janji temu, maupun kunjungan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pihak Desa dan Puskesmas setempat.

Aksi ke 7 : Pengukuran dan Publikasi Data Stunting

Upaya Kabupaten untuk mendapatkan data prevalensi *stunting* terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan dan desa. Dimana hasil dari data publikasi angka *stunting* digunakan sebagai media advokasi dalam memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan bersama menurunkan *stunting*, melalui peningkatan efektivitas penentuan target layanan dan alokasi sumber daya serta pemecahan dan memantau proses pemecahan masalah di level desa hingga Kabupaten. Ketersediaan data *stunting* ini dinilai sangat penting sehingga proses pengambilan datanya dilakukan secara rutin. Adapun opsi platform yang dapat digunakan dalam pengukuran data yaitu melalui Posyandu, Bulan Penimbangan Balita, Survei Gizi, kegiatan distribusi vitamin A dan lainnya.

Aksi ke 8 : Review Kinerja Tahunan

Reviem Kinerja Tahunan dilaksanakan secara meeting online yang diikuti oleh Tim Provinsi dan Tim Koordinasi / Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Kabupaten Trenggalek. Peserta Kabupaten selama mengikuti berada pada

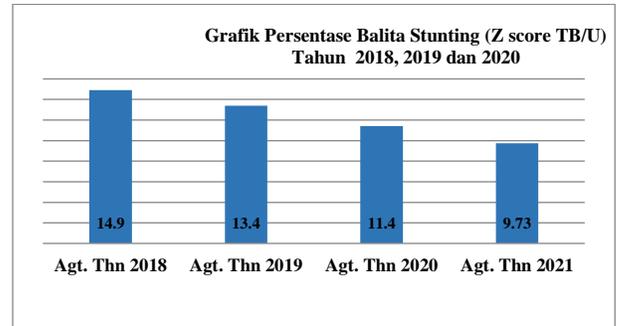


ruang yang sama dengan menerapkan Protokol Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku di Kabupaten Trenggalek. Review Kinerja selanjutnya dilakukan di Yogyakarta oleh Dirjend Bina Bangda. Pada Penilaian Kinerja tersebut, Kabupaten Trenggalek mendapatkan Peringkat 1 Terbaik Dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020.

Pada masa pandemi COVID-19 ada beberapa indikator intervensi gizi spesifik dalam program pencegahan dan penanggulangan stunting yang terdampak. Salah satunya yaitu pemantauan pertumbuhan dan konseling balita dengan masalah gizi baik stunting, wasting, maupun underweight. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kader, bidan dan petugas gizi Puskesmas bekerjasama untuk memantau pola makan dan melakukan konseling secara daring untuk ibu balita yang memiliki telepon genggam dan aplikasi WhatsApp. Namun untuk pengukuran pertumbuhannya dilakukan dengan kunjungan rumah, apabila daerah tersebut tidak termasuk zona hijau. Selain itu, alat antropometri utamanya untuk mengukur Berat Badan berupa timbangan digital sangat membantu dan memudahkan baik petugas maupun kader untuk pelaksanaan Posyandu di masa Pandemi Covid 19.

Pada pelaksanaan Bulan Penimbangan bulan Agustus tahun 2020, Pelaksanaan disesuaikan dengan zonasi, untuk zona hijau. Sedangkan untuk zona lainnya dilakukan dengan kunjungan atau janji temu. Hasil Bulan Penimbangan sebelum masa pandemi yaitu bulan Agustus tahun 2019 sebesar 13,4% (4957 balita), hasil Bulan Penimbangan di bulan Agustus 2020 menunjukkan hasil sebesar 11,4% (4111 balita) sedangkan hasil Bulan Penimbangan di bulan Agustus 2021 menunjukkan hasil sebesar 9,73% (3506 balita).

Persentase Data Stunting



Sumber : Bulan Penimbangan Balita, Dinas kesehatan PPKB Kabupaten Trenggalek Tahun 2018, 2019 dan 2020

PENUTUP

Kesimpulan

Pencegahan stunting dilakukan melalui 8 aksi integrasi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan sensitif. Melalui kegiatan ini maka pemerintah Kabupaten Trenggalek mampu untuk menyasar kelompok prioritas yang selanjutnya digunakan sebagai kunci pemberian intervensi dan perbaikan tumbuh kembang sehingga keberhasilan dalam rangka menekan angka *stunting* akan tercapai. Diharapkan dalam setiap langkah aksi integrasi adanya komitmen pimpinan tertinggi di setiap level sehingga diharapkan program pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan maksimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Diana Kartanegara, 2003. *Strategi Membangun Eksekutif*. [Online]. Tersedia: <http://www.pln.co.id/fokus/ArtikelTunggal.asp?ArtikelId=268>
- [2] Stephen C. Harper.2001, *The Forward-Focused Organization: Visionary Thinking and Breakthrough Leadership to Create Your Company's Future*, MY AMACOM, American Management Association, New York.
- [3] Burt Nanus. 1992, *Visionary Leadership: Creating a Compelling Sense of Direction for Your Organization*. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.



-
- [4] Bappenas. (2018). Rencana Aksi Nasional Dalam Rangka Penurunan Stunting. Rembuk Stunting: Jakarta.
- [5] Kabupaten Trenggalek, Profil Aksi Konvergensi Stunting 2020
- [6] Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- [7] Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.